

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan Kredit lainnya. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007 Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.

Seiring berjalannya waktu persaingan antara usaha-usaha semakin meningkat. Ada berbagai cara pelaku usaha melakukan strategi dan upaya dalam menghadapi pesaingan yang semakin ketat. Banyak masyarakat yang penghasilannya tidak seberapa adalah masyarakat yang paling mendominasi, negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, Indonesia adalah salah satunya. Indonesia termasuk negara yang sangat berpotensi dalam bidang perkreditan, tujuannya karena banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kini bank telah hadir sebagai penyelamat masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena adanya perkreditan, masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mengajukan kredit dengan

hanya menggunakan jaminan. Bank adalah suatu lembaga perantara, yang tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit.

Menurut, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa kredit merupakan suatu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak peminjam, mewajibkan untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Febri Karauwan (2012), menjelaskan bahwa Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan berkas, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain (Abdurrahman 1982 : 81).

Fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat mengatasi serta memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran dan tingkat pendapatan yang diperoleh masih tergolong rendah.

Kredit Usaha Rakyat dapat diartikan sebagai sumber modal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dapat dimanfaatkan untuk pengadaan

fasilitas usaha yang akan digunakan sebagai proses produksi. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha disektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sumber modalnya berasal dari perbankan.

UU No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 yang mengatur tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ketersediaan modal dalam suatu usaha mampu bertahan dan mampu berkembang jauh lebih besar, karena adanya modal pemilik usaha akan bisa mengembangkan usaha yang besar dan memiliki nilai yang tinggi, bukan hanya dengan modal tetapi dengan niat dan kegigihan pemilik usaha bisa jauh lebih maju dan berkembang

Di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, masyarakat UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang membutuhkan modal usaha, dengan munculnya KUR masyarakat bisa mendapatkan modal usaha melalui pinjaman, BRI Unit Tapa yang menyediakan pinjaman KUR dengan besar pinjaman dari Rp.5.000.000 sampai Rp. 25.000.000. Dalam menyalurkan KUR masyarakat UMKM harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank, jika persyaratan sudah dipenuhi maka peminjam bisa memohon kredit KUR pada Bank.

Kesejahteraan masyarakat dalam penyaluran KUR ini terlihat jelas bahwa masyarakat sangat memanfaatkan KUR untuk kehidupan dan usaha yang mereka jalankan. Ekonomi UMKM mengalami perubahan dan peningkatan semenjak KUR

muncul karena KUR adalah sumber modal usaha yang dibutuhkan oleh para UMKM. Dampak dari penyaluran KUR sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini membuat para UMKM bergerak untuk meningkatkan usahanya dan meningkatkan sektor ekonomi UMKM.

Penyaluran KUR tidak dapat dipungkiri, mengandung risiko bermasalah. Kredit yang bermasalah akan terjadi apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Pemerintah membuat suatu aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 mengenai fasilitas penjaminana fasilitas kredit usaha rakyat yang sudah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009.

Secara umum tujuan penyelenggaraan kredit KUR oleh pemerintah adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk menciptakan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan pada masyarakat. Maka untuk mewujudkan tujuan itu, pemerintah menerbitkan paket kebijakan pengembangan dan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) itu sendiri yaitu, Peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK dan reformasi regulasi UMKMK.

Penilaian efektivitas dalam penyaluran KUR dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil dapat di ukur menggunakan lima aspek, yaitu

aspek ketepatan sasaran program, aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasabah, aspek ketepatan beban kredit dan aspek ketepatan prosedur. Faktor-faktor produksi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

Prosedur dalam pemberian kredit KUR merupakan salah satu ketentuan standar dalam memberikan kredit, kepada nasabah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dengan berbagai persyaratan yang diberikan oleh Bank Pelaksana. Seperti, petani calon penerima KUR dapat mengajukan kredit KUR pada Bank Pelaksana dan pihak Bank Pelaksana melakukan evaluasi terhadap usulan kredit atau pembiayaan yang diajukan petani calon penerima kredit KUR. Dalam Proses permohonan kredit, Lukman (2005:74) mengatakan bahwa kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling bertukar informasi dasar antara calon debitur dan Bank terutama calon debitur yang baru pertama kali mengajukan fasilitas kredit kepada bank.

Lukman (2005:75) mengatakan bahwa setelah permohonan kredit diterima oleh Bank (biasanya yang menerima adalah accaount officer/wirakredit atau kepala bagian kredit), maka calon debitur diminta untuk memberi keterangan-keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang disampaikannya kepada Bank. Keterangan-keterangan tersebut bisa disampaikan secara lisan melalui wawancara maupun tertulis sesuai dengan informasi maupun data yang diminta oleh AO dari Bank. Selanjutnya, AO melakukan analisis yang mendalam tentang keadaan

usaha/proyek pemohon kredit berdasarkan pedoman (manual) yang sudah ditentukan oleh Bank dan biasanya tergantung kepada jenis kredit yang diminta.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka identifikasi masalah yaitu KUR sangat berpengaruh bagi masyarakat UMKM dari berbagai jenis pengkreditan yang diberikan oleh Bank akan tetapi masyarakat UMKM memilih kredit KUR.

Dalam penyaluran KUR kepada masyarakat UMKM tidak dapat dipungkiri bisa mengandung resiko bermasalah, kredit bermasalah akan terjadi apabila peminjam tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan, maka akan terjadi yang namanya kredit macet

Sering didapatkan selama pemberian KUR pada BRI Unit Tapa, nasabah sering kali memberikan data yang tidak akurat untuk mendapatkan KUR. Permasalahan lainnya di lapangan oleh pihak Bank banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham mengenai KUR. Ada pula masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kendala dalam penyaluran kredit KUR pada masyarakat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango ?
2. Apa saja permasalahan penyaluran kredit KUR pada masyarakat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango ?

3. Apakah solusi dalam penyaluran kredit KUR pada masyarakat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango ?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala dalam penyaluran kredit KUR pada masyarakat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
2. Untuk mengetahui permasalahan dalam penyaluran kredit KUR pada masyarakat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
3. Untuk mengetahui solusi dalam penyaluran kredit KUR pada masyarakat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango

1.5.Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya mengenai informasi tentang kualitatif yang dilihat dari beberapa teori, informasi, dan laporan keuangan. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Untuk masyarakat Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka bisa menjadi bahan masukan untuk masyarakat agar nantinya masyarakat bisa menjadi pengusaha yang sukses, yang berawal dari usaha yang kecil menjadi usaha yang besar dengan adanya kredit KUR ini yang bisa menjadi suatu modal usaha.